

Analisis Demand dan Kesiapan Peningkatan Status UPTD Puskesmas Peusangan Menjadi Rumah Sakit Tipe D Daerah Bireuen

Analysis of Demand & Readiness To Improve Uptd Status Of Peusangan Public Health Center To Be A Type D Hospital In Bireuen Region

Hanidi^{1*}, Arifah Devi Fitriani², Juliandi Harahap³, Deli Theo⁴, Jamaluddin⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Kesehatan Helvetia, Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan 20124

*Koresponding Penulis: [1hanidyy@gmail.com](mailto:hanidyy@gmail.com); [2arifahdevifitriania@helvetia.ac.id](mailto:arifahdevifitriania@helvetia.ac.id)

Abstrak

Kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia diharapkan mampu memberikan pemerataan layanan kesehatan, salah satunya dengan meningkatkan status puskesmas menjadi rumah sakit terutama pada daerah dengan angka rujukan tinggi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui *demand* masyarakat dan kesiapan terhadap peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D di Kabupaten Bireuen. Metode: pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dilakukan pada 34 informan yang meliputi masyarakat dan tokoh setempat, pihak manajemen puskesmas, dinas kesehatan, komisi kesehatan DPRK dan pihak pemerintah kabupaten Bireuen. Hasil analisis kualitatif memberikan gambaran bahwa tingginya demand masyarakat terhadap peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit type D, selain itu pihak puskesmas telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun administratif. Dinas kesehatan dan pihak pemerintah kabupaten dan badan legiaslasi juga memberikan dukungan kebijakan dan finansial yang mencukupi sehingga diharapkan program tersebut terlaksana secepatnya. Sementara, kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya upaya yang terintegarsi oleh semua pihak terutama dalam memantau perkembangan dan mendiskusikan secara bersama sama. Kesimpulan diperoleh bahwa perlunya membentuk tim percepatan lintas sector untuk dapat berkerja sama secara intens dalam mewujudkan program peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D.

Kata Kunci: Demand, Kesiapan, Puskesmas, Rumah Sakit

Abstract

The Policies in health development in Indonesia are expected to be able to provide equal distribution of health services, one of policy intervention is by increasing the status of puskesmas (public health center) to hospitals, especially in areas with high referral rates. The purpose of the study was to determine the community's demand and readiness to increase the status of the Puskesmas to a Type D Hospital in Bireuen Regency Methods: a qualitative approach with in-depth interviews conducted with 34 informants including the community and local leaders, the management of the puskesmas, the health office, the DPRK (parliament) health commission and the Bireuen District Government The results of the qualitative analysis illustrate that there is a high demand from the community for the improvement of the puskesmas into a type D hospital, besides that the puskesmas has made various technical and administrative preparations. The health office and district

government and legislative bodies also provide adequate policy and financial support so that the program is expected to be implemented as soon as possible. Meanwhile, the current obstacle is that there are no integrated efforts by all parties, especially in monitoring developments and discussing them together. The conclusion is that it is necessary to form a cross-sectoral acceleration team to be able to work intensely in realizing the program to increase the status of the puskesmas to become a type D hospital.

Keywords: *Demand, Feasibility, Public Health Center, Hospital*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya standar hidup manusia karena kesehatan dibutuhkan untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Konstitusi Organisasi Kesehatan sedunia (WHO) tahun 1948 menyatakan bahwa “*Health is a fundamental human right*”, yang memiliki makna bahwa kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi seorang manusia (Haning, Rochmah, & Aimanah, 2018)

Sebagai suatu kebutuhan dasar, pemenuhan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab setiap orang, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah, karena secara konstitusional, Pemerintah wajib menjamin seluruh warganya berada disetiap wilayah agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas dan standar yang sama serta tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa Puskesmas adalah “fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dan upaya kesehatan perserorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya”(Mangkoan, 2016)

Dalam era globalisasi saat ini, Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan bermutu sehingga dapat meningkatkan citra pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan baik dari bidang manajemen, SDM dan sarana prasarana pendukung. Dalam bidang anggaran pun dibutuhkan perubahan dari penganggaran biasa ke penganggaran berbasis kinerja, mengingat kebutuhan dana yang tinggi dengan sumber dana yang terbatas, sehingga kita dituntut untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin.

Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas merupakan pelayanan yang menyeluruh yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia (Harefa, 2016)

Pemerintah Kabupaten Bireuen berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan ditinjau dari aspek manajerial maupun pelayanan. Adapun dalam konteks pelayanan kesehatan, beberapa puskesmas telah berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanannya untuk memenuhi standarisasi dari BPJS maupun tuntutan masyarakat.

Pemerintah Bireuen berupaya secara terus menerus untuk mengembangkan berbagai inovasi dan ekstensifikasi pelayanan sehingga menjadikan puskesmas dapat bersaing dengan klinik-klinik swasta.

Analisis permintaan dari aspek lahan dan lokasi, menyatakan cukup strategis untuk pembangunan RS Kelas D yang direncanakan menyediakan 60 Tempat Tidur (TT) atau sebesar + 75% dari kebutuhan minimal 84 TT di Kecamatan Peusangan tahun 2019. Dari aspek teknis, lahan rencana lokasi pembangunan rumah sakit tidak dijumpai adanya kendala, sehingga secara teknis pembangunan RS Kelas D ini layak untuk dilanjutkan dengan mengikuti konsep dan rancangan rencana penataan site dan bangunan yang telah dirumuskan. Untuk kebutuhan peralatan medis, SDM, serta organisasi dan uraian tugas dijabarkan melalui pendekatan jenis pelayanan kesehatan dan jumlah TT yang disediakan.

Berdasarkan metode matrik yang dipakai, diperoleh nilai Break Event Point (BEP) pada jumlah pendapatan sebesar 52,12% dari pendapatan normal atau sama dengan Rp. 4.002.255.553,- ditambah pendapatan lain-lain sebesar Rp. 153.300.000,- atau sama dengan Rp. 4.155.555.553,- setahun. Dengan nilai BEP pada 52,12% ini diperoleh besarnya Net Present Value (NPV) = 0; nilai Internal Rate of Return (IRR) = 12,56% sama dengan DR/DRC (Discount Rate of Capital); dan Benefit Cost Ratio (BCR) = 1, yaitu jumlah pendapatan dibagi 1+i atau DRC secara simultan.

Pada analisis discounted cash flow yang dibuat, dapat memperlihatkan besarnya nilai Internal Rate of Return (IRR) dalam kondisi normal adalah sebesar 25,898%, yang jauh lebih besar dari DR/DRC yang besarnya hanya 12,56%, sehingga proyek RS Kelas D ini dinyatakan sangat layak untuk dibangun.

Untuk nilai Net Present Value (NPV) besarnya merupakan jumlah pendapatan setiap tahun yang dibagi dengan 1 ditambah besarnya DR/DRC secara simultan selama tahun proyeksi dikurangi modal (investasi) awal. Dari perhitungan dengan memakai metode matrik discounted cash flow, diperoleh besarnya Net Present Value (NPV) adalah sebesar Rp. 31.047.585.660,-. Dengan demikian, besarnya Benefit Cost Ratio (BCR) adalah 2,0662, sehingga proyek RS Kelas D ini juga dapat dinyatakan layak untuk dibangun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah penelitian Puskesmas berubah menjadi Rumah Sakit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atau informasi yang mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang yang memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersirat tentang sikap, kepercayaan, motivasi, dan perilaku individu (Putra & HENDARTO, 2010). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai bulan Oktober 2021.

Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci yaitu tokoh masyarakat sebanyak 5 orang (Muspika setempat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Desa dan tokoh lainnya dalam wilayah Puskesmas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berupa kutipan wawancara yang menjelaskan jawaban dari informan mengenai kesiapan peningkatan status Puskesmas Peusangan menjadi Rumah Sakit Tipe D meliputi *demand* masyarakat, kesiapan provider, komitmen stakeholder dan dukungan tokoh masyarakat. Tahapan tersebut yang kemudian dijelaskan secara rinci pada penelitian ini. Berikut hasil penelitiannya:

1. Demand masyarakat terhadap peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D

Dari keseluruhan masyarakat yang informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pernah merasakan pelayanan di puskesmas, bahkan sebagian besarnya pernah dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Dari beberapa pernyataan hasil wawancara tergambar bahwa adanya kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan di tingkat rujukan tersebut, hal ini dikarenakan jarak dan beberapa kendala lainnya seperti keterbatasan biaya dan waktu. Kondisi ini menjadi alasan utama keinginan masyarakat agar puskesmas dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit. Berikut petikan hasil wawancara terkait permintaan dan harapan masyarakat.

“ Kami sangat mengharapkan puskesmas disini dapat segera ditingkatkan menjadi rumah sakit untuk kemudian memberikan kemudahan bagi dalam mengakses pelayanan lanjutan, sehingga kendala selama ini seperti jarak, biaya dan waktu tidak lagi menjadi hambatan (masyarakat) “

Karenanya, dalam berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat tentang kesediaan untuk mendukung percepatan peningkatan status puskesmas, ditemukan keterangan yang menunjukkan kesiapan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh sehingga harapan tersebut dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Keterangan ini dapat dilihat pada petikan hasil wawancara berikut :

“ Bila diminta kesediaan untuk mendukung program ini, saya dan masyarakat lain tentunya akan selalu mendukung dan berupaya untuk sama-sama mencari jalan supaya program ini dapat dilaksanakan demi kemudahan masyarakat disini berobat “

Masyarakat berharap dengan berubahnya status puskesmas menjadi Rumah sakit mereka tidak perlu lagi harus ke Bireuen untuk dapat ditangani oleh dokter spesialis seperti penyakit dalam dan bedah dengan begitu dapat menghemat biaya dan waktu khususnya bagi keluarga yang mendampingi orang sakit.

2. Kesiapan provider terhadap Peningkatan Status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D

Kesiapan puskesmas dalam upaya peningkatan status menjadi rumah sakit sangat penting dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan program tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa manajemen puskesmas didapatkan keterangan bahwa pihak puskesmas sangat mendukung dan menyatakan kesiapannya. Hal ini dapat dari hasil wawancara sebagai berikut:

‘Kami sangat mendukung dengan upaya tersebut (peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit) dan saat ini kami terus melakukan komunikasi dengan dinas dan pihak terkait untuk dapat mempersiapkan semuanya sehingga maksud tersebut tidak terkendala termasuk menyiapkan dokumen dan dukungan dari berbagai pihak seperti dari DPRK Bireuen’

Dalam wawancara juga terungkap bahwa pihak puskesmas dan dinas kesehatan telah menyiapkan kajian akademis seperti uji kelayakan dan berbagai persiapan lainnya sebagai bentuk keseriusan pihak puskesmas dalam mengupayakan terwujudnya harapan tersebut. Hasil analisis dari aspek eksternal (kebijakan, demografi, geografi, sosial ekonomi, sosial budaya) menunjukkan bahwa kondisinya sangat mendukung rencana pembangunan RS Kelas D di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen . Demikian juga dari aspek internal (sarana kesehatan, pola penyakit dan epidemiologi, teknologi, SDM/ketenagakerjaan Rumah Sakit, organisasi, kinerja dan keuangan) menyatakan bahwa rencana pembangunan RS Kelas D ini sangat dibutuhkan. Puskesmas Peusangan mempunyai sumber daya manusia 279 tenaga kesehatan diantaranya Dokter Umum 7, Perawat 74, Bidan 125, Kesehatan Masyarakat 14, Farmasi 6 dan Nakes lainnya 53 dan untuk 4 Spesialis dasar di Kabupaten Bireuen sudah ada 35 dokter spesialis diantaranya spesialis penyakit dalam 14 orang, spesialis bedah 8 orang sepesialis anak 7 orang dan spesialis obgyn 6 orang. Puskesmas Peusangan yang terletak di pinggir jalan raya Medan – Banda Aceh dengan luas area ± 1 Ha dengan dilengkapi sarana dan prasarana gedung UGD yang terpisah, rawat jalan, laboraterium dan rawat inap.

Begitu juga dengan dukungan masyarakat yang begitu antusias sehingga menjadi spirit tersendiri bagi puskesmas. Apalagi puskesmas memiliki area yang cukup luas yang bisa dijadikan lahan pengembangan puskesmas. Berikut petikan terkait persiapan yang telah dilakukan oleh pihak puskesmas berdasarkan jawaban dari berbagai sumber yang mewakili manajemen puskesmas.

“Saat ini kami terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D, seperti menyiapkan dokumen administratif, data profil SDM dan kependudukan, melakukan musyawarah dengan lingkungan sekitar”

Ketika disinggung tentang apakah ada kendala selama ini dalam hal pelayanan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, sebagian manajemen puskesmas menyebutkan bahwa saat layanan rujukan dilaksanakan pihaknya sebagaimana mestinya, melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak rumah sakit dan terkadang pasien tidak dapat dirujuk oleh karena terbatasnya daya tampung rumah sakit terutama ruang perawatan kelas III sesuai dengan persyaratan BPJS. Kondisi tersebut diatas menjadi salah satu alasan utama bagi masyarakat bersama pihak puskesmas untuk terus berusaha secara bersama-sama mewujudkan peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D.

Selain itu, terdapat pula beberapa kendala yang menjadi perhatian pihak manajemen dalam upaya peningkatan status puskesmas, persoalan tersebut adalah bahwa letak puskesmas persis di perbatasan dua desa yaitu Desa Blang Asan dan Desa Gampong Raya Dagang. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya melakukan komunikasi secara bersamaan dengan melibatkan kedua pihak desa tersebut. Sementara kendala lainnya yang dihadapi adalah minimnya dukungan finansial dari Pemerintah Kabupaten Bireuen, terutama saat pandemic dimana terpat pergeseran alokasi keuangan daerah (*refocusing*) untuk mengatasi pandemic Covid – 19.

3. Komitmen Stakeholder terhadap Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D.

Komitmen para pengambil kebijakan menjadi sangat penting dalam mempercepat peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D. dalam hal menyambut keinginan masyarakat tersebut pihak pemerintah menyatakan sangat mendukung program tersebut, dengan harapan adanya rumah sakit Type akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan. Apalagi saat ini Kabupaten Bireuen belum memiliki fasilitas lanjutan type D milik Pemerintah. Keterangan ini dapat dilihat pada petikan wawancara berikut ini:

“ Kami sangat mendukung usulan masyarakat ini, dan sebenarnya peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D merupakan program unggulan Bapak Almarhun Bupati, sehingga kami tetap komit untuk merealisasikannya (Asisten 3 Pemerintahan Kabupaten Bireuen) “

Hal yang sama juga disebutkan oleh pihak anggota legislatif dari komisi 3 yang membawahi bidang kesehatan. Seperti keterangan dari petikan wawancara berikut

“Kami melihat sudah selayaknya Bireuen memiliki 2 rumah sakit Type D yang dapat menampung pasien dari wilayah barat dan timur, apalagi saat ini pasien lebih banyak dirujuk ke rumah sakit swasta sesuai dengan konsep rujukan berjenjang. Sementara rumah sakit pemerintah yang ada adalah type B yaitu RSUD dr. Fauziah. Karenanya Program ini kami dukung sepenuhnya tinggal lagi bagaimana peran Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan semuanya, dan kami merencanakan untuk memanggil

mereka (Dinas Kesehatan) untuk menanyakan sejauh mana proses yang sudah berjalan dan apa kendalanya “

Di lain pihak, pihak Dinas Kesehatan menyatakan bahwa saat ini terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan terutama uji dampak lingkungan (AMDAL), sumber daya manusia (SDM) dan peralatan medis lainnya yang sesuai standar, sementara saat ini pemerintah tengah focus pada penanganan pandemic covid 19 sehingga terjadi refocusing anggaran dan berbagai persiapan untuk meningkatkan status puskesmas tersebut mesti disesuaikan dengan kondisi ini. Keterangan ini disampaikan Kabid PSDK mewakili Kepala Dinas Kesehatan seperti dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Bagi kami peningkatan status puskesmas menjadi rumah type D adalah program penting apalagi setelah berlakunya rujukan berjenjang, sehingga kita merencanakan untuk menjadikan 2 puskesmas untuk dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit type D. kerananya kita terus berupaya termasuk melakukan uji kelayakan dan berbagai persiapan teknis lainnya seperti persiapan SDM dan penyediaan peralatan medis. Namun semua persiapan ini mulai terkendala sejak pandemic covid 2 tahun ini, dikarenakan adanya refocusing anggaran daerah dimana seluruh program kesehatan juga turut terimbas karenanya“

Dalam hal berbagai kendala yang dihadapi teruma terkait anggaran, Pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berkomitmen untuk dapat mempergunakan anggaran otsus (otonomi khusus) atau DAK (Dana Alokasi Khusus) pada Tahun berikutnya (2022). Sehingga diharapkan peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D dapat terealisasi paling lambat tahun 2023. Komitmen ini dapat dilihat pada petikan hasil wawancara berikut dengan pihak pemerintah dalam hal ini Bapeda yang diwakili Kasubbid Kependudukan dan Kesehatan Sosial.

“Kita punya peluang untuk menggunakan dana Otsus atau DAK tahun tahun 2022 sehingga berbagai kendala terutama persoalan anggaran akibat *refocusing* ini dapat teratasi. Kita berharap tahun 2023 ada penambahan 2 puskesmas yang meningkat statusnya menjadi rumah sakit type D. Langkah ini menjadi amat penting karenanya tetap kami prioritaskan selama dalam priode kami, Insya Allah tahun 2023 semuanya sudah dapat dinikmati oleh masyarakat“

4. Dukungan Tokoh Masyarakat terhadap Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D

Selain dukungan pemerintah dan pihak legislatif, Tokoh masyarakat juga turut memberikan dukungan penuh dan siap untuk memfasilitasi segala persiapan yang diperlukan dalam upaya peningkatan status puskesmas, terutama menyangkut kesiapan lahan dan persoalan sosial lainnya dengan warga dan perangkat desa sekitar lokasi. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat salah satu kendala selama ini adalah lokasi

puskesmas yang terletak dilokasi perbatasan dua desa sehingga terdapatnya keterbatasan dalam hal membangun komunikasi bersama para pihak. Penjelasan ini dapat di lihat pada petikan hasil wawancara berikut:

“Sudah selayaknya daerah ini memiliki rumah sakit type D yang menjadi rujukan dari beberapa puskesmas sekitar, ini mengingat selama ini, kami merasakan berbagai kendala baik jarak maupun biaya dan waktu dalam mengaksises pelayanan di rumah sakit dr. fauziah, apalagi saat ini katanya tidak boleh lagi langsung ke RSUD dr. Fauziah, sementara kalau kami harus ke Rs Swasta belum tentu ada ruangnya. Karena kami sanga mendukung dan berupaya untuk memfasilitasi dan membantu segala hal, sehingga upaya ini dapat terwujud”

Dalam hal komitmen dan dukungan dari tokoh masyarakat, saat ini telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan beberapa pihak terutama warga sekitar dan perangkat desa, juga dihadiri pihak Muspika Kecamatan setempat untuk memastikan tidak terdapat kendala yang berarti seperti masalah dampak lingkungan akibat pendirian rumah sakit nantinya. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan berbagai pihak, terungkap bahwa telah dilakukan peninjauan kelayakann (feasibiliti studi) oleh pihak Dinas Kesehatan termasuk analisis dampak lingkungan yang akan dilakukan bersama dinas Lingkungan hidup untuk menyahuti kegelisahan para tokoh masyarakat.

Dari berbagai keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pihak telah sepakat dan berkomitmen untuk saling bekerja seiring harapan semua pihak agar peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit type D dapat segera terwujud.

Sementara terkait minimnya anggaran akibat refocusing anggaran karena pandemic, akan diselesaikan dengan alokasi anggaran pada tahun berikutnya (2022) yang bersumber dari anggaran OTSUS atau DAK. Dengan demikian semua pihak berharap pada tahun 2023 akan ada penambahan rumah sakit type D untuk menampung dan memepmudah akses pelayanan rujukan berjenjang dari puskesmas dalam wilayah Kabupaten Birueun.

KESIMPULAN

1. Demand masyarakat terhadap peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D adalah sangat tinggi, sehingga masyarakat sangat mengharap peningkatan status puskesmas tersebut dapat teralisasi dalam waktu dekat.
2. Kesiapan provider terhadap peningkatan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D sudah baik dimana puskesmas telah turut serta menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan, begitu juga dengan persiapan lainnya seperti uji AMDAL, penataan SDM puskesmas dan turut serta memfasilitasi pertemuan dengan warga dan tokoh masyarakat sekitar.
3. Stakeholder telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D, dengan menyiapkan dokumen kajian akademis (studi kelayakan dan pemetaan SDM). Sementara kebutuhan anggaran

akan dialokasikan pada tahun 2022 dengan menggunakan pos anggaran yang bersumber otonomi khusus.

4. Dukungan tokoh masyarakat terhadap peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D sangat tinggi, dengan ikut serta dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, pihak pemerintah dari kecamatan, kabupaten dan juga dengan pihak legislatif.

SARAN

1. Kepada Pihak Provaider (Puskesmas) diharapkan dapat terus meningkatkan komunikasi dengan pihak desa terutama menyangkut penyelesaian lokasi puskesmas yang terletak diperbatasan dua desa setempat. Selain itu perlu segera menyusun kebutuhan SDM dan berbagai kebutuhan lainnya serta peningkatan kapasitas SDM dalam rangka persiapan peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit.
2. Kepada Pihak Dinas Kesehatan diharapkan dapat membentuk tim percepatan peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D, tim ini juga turut membangun komunikasi dengan berbagai pihak pemerintah (stakeholder) termasuk Dinas Lingkungan dalam kajian AMDAL dan pihak legislatif untuk memastikan pos anggaran yang digunakan selama proses berlangsung
3. Kepada Pihak Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bapak Bupati dan Pihak Anggaran DPRK Bireuen diharapkan dapat memfokuskan anggaran untuk membiayai seluruh persiapan terutama dalam hal penguatan kapasitas SDM, investasi gedung dan peralatan medis yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriska Haning, Dkk. Analisis Need Dan Demand Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Siwalankerto Kota Surabaya Di Era Jkn. Jurnal Online 2018.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentangpuskesmas.[Http://Hukor.Kemkes.Go.Id/Uploads/Produk_Hukum/Pmk%20no.%2075%20ttg%20puskesmas.Pdf](http://Hukor.Kemkes.Go.Id/Uploads/Produk_Hukum/Pmk%20no.%2075%20ttg%20puskesmas.Pdf).
- Evi Martalinda Harefa. Pelaksanaan Pelayanan Promotif Dan Preventif Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2016. Medan, Universitas Sumatera Utara. Tesis online. 2016.
- Kesiapan Tata Kelola Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (D).Jurnal Online. 2018.
- Wayan Citra Wulan Sucipta Putri, Dkk. Dasar-dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Modul Pembekalan Manajemen dan Program Puskemas. 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang pusat kesehatan masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Ratih Anggraeni. Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Deepublish: Yogyakarta. Google book. 2019.

Saryono. Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis bagi Pemula. Jogjakarta : Media Cendekia.2 010.

Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2012.

Ade Heryana. Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Artikel online. Universitas Esa Unggul: Jakarta. 2018.